



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

12 – 13 Juni 2023



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

13 / 06 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Senin, 12 Juni 2023</p> <p>https://radarsukabumi.com/berita-utama/nasib-tol-bocimi-terancam-mangkrak-pembebasan-lahannya-tidak-masuk-daftar-anggaran-psn/</p> <p>Nasib Tol Bocimi Terancam Mangkrak, Pembebasan Lahannya Tidak Masuk Daftar Anggaran PSN</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna</p> <p>Proses pengerjaan untuk Seksi II Cigombong-Cibadak exit Tol <u>Parungkuda</u> tidak semulus pada proses pengerjaan Seksi I. Buktinya, sudah hampir 5 tahun Tol <u>Bocimi</u> Seksi II tak kunjung selesai dan diresmikan. Padahal pada 2024 mendatang, pemerintah menargetkan pengerjaan Tol Bocimi bakal selesai sampai Seksi III atau exit Tol <u>Sukabumi</u> Barat di wilayah Jalur Cibolang. Namun, keinginan pemerintah sepertinya tidak akan mulus. Pasalnya, Waskita Toll Road yang sebelumnya mengakuisisi MNC Trans Jawa Toll malah bermasalah. Belakangan muncul isu bahwa Tol Bocimi tidak masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Namun, isu tersebut dibantah oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna. Menurutnya, pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) tengah dipercepat untuk memperjelas kelanjutannya. Padahal, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sudah secara resmi digantikan oleh PT Hutama Karya (Persero) untuk melanjutkan proses pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi III Cibadak Exit Tol Parungkuda-Sukabumi Barat Cibolang.</p>	+
2	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER	<p>Selasa, 13 Juni 2023</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2023/06/13/053000921/sebagian-masyarakat-minta-syarat-beli-rumah-subsidi-diperlonggar</p> <p>Sebagian Masyarakat Minta Syarat Beli Rumah Subsidi Diperlonggar</p> <p>-</p>	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

13 / 06 / 2023

| Analisis Pemberitaan Media Online

RESUME	<p>Sebagian masyarakat, khususnya kelas menengah, meminta Pemerintah untuk mempermudah persyaratan membeli rumah subsidi. Hal itu sebagaimana dikutip dari laporan Rumah.com bertajuk Indonesia Consumer Sentiment Survey H1-2023. Program rumah subsidi bukan hal yang asing bagi masyarakat. Lebih dari separuh responden mengaku telah mengetahui seputar program ini. Meski demikian, 3 dari 5 responden merasa program ini belum terlalu signifikan dalam mengatasi permasalahan hunian di Indonesia. Untuk itu, 1 dari 2 responden ingin manfaat hunian subsidi dikurangi tetapi syarat diperlonggar. Atau bisa dibilang, separuh responden berharap Pemerintah memperlonggar syarat pembelian rumah subsidi agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Harapan ini terutama datang dari responden kelas menengah yang sudah tak memenuhi syarat penghasilan untuk rumah subsidi, namun merasa penghasilannya masih terlalu kecil untuk membeli atau mencicil rumah non-subsidi. Ada 2 dari 5 responden mengaku tak memenuhi syarat membeli rumah subsidi. Namun mereka juga tak mampu membeli hunian non-subsidi.</p>
---------------	---



12 / 06 / 2023

Sumber: radarsukabumi.com

Nasib Tol Bocimi Terancam Mangkrak, Pembebasan Lahannya Tidak Masuk Daftar Anggaran PSN

Author: Handi Salam

SUKABUMI — 26 tahun silam tepatnya tahun 1997 tol Bogor Ciawi Sukabumi (**Bocimi**) ditetapkan pemerintah, namun proses pengerjaannya baru dilaksanakan pada 2016 dan untuk sesi I Ciawi hingga Cigombong selesai dalam waktu dua tahun saja. Buktinya Sabtu (1/12/2018) Presiden Joko Widodo tepatnya pada pukul 12.10 WIB – 14.10 WIB meresmikan tol Bocimi.

Namun, proses pengerjaan untuk Seksi II Cigombong-Cibadak exit Tol Parungkuda tidak semulus pada proses pengerjaan Seksi I. Buktinya, sudah hampir 5 tahun Tol Bocimi Seksi II tak kunjung selesai dan diresmikan.

Padahal pada 2024 mendatang, pemerintah menargetkan pengerjaan Tol Bocimi bakal selesai sampai Seksi III atau exit Tol Sukabumi Barat di wilayah Jalur Cibolang. Namun, keinginan pemerintah sepertinya tidak akan mulus. Pasalnya, Waskita Toll Road yang sebelumnya mengakuisisi MNC Trans Jawa Toll malah bermasalah.

Belakangan muncul isu bahwa Tol Bocimi tidak masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Namun, isu tersebut dibantah oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna.

Menurutnya, pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (**Bocimi**) tengah dipercepat untuk memperjelas

kelanjutannya. Padahal, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sudah secara resmi digantikan oleh PT Hutama Karya (Persero) untuk melanjutkan proses pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (**Bocimi**) Seksi III Cibadak Exit Tol Parungkuda-Sukabumi Barat Cibolang.

Herry memang berharap tidak adanya revisi tentang pembangunan Tol Bocimi hingga dikeluarkan dari PSN. Hal tersebut sejalan dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan pihaknya masih mengkaji kelanjutan kedua proyek tersebut sebagai PSN. “Kita belum bicara untuk keluar dari PSN. Masih akan dibahas,” kata Wahyu.

Pembebasan Lahan Tidak Masuk Daftar PSN

Berdasarkan data Lembaga Manajemen Aset, proses pembebasan lahan Jalan Tol Getaci termasuk yang didanai oleh pemerintah, sedangkan Jalan Tol Bocimi tidak termasuk dalam daftar.

Alokasi dana pendanaan pengadaan lahan PSN selama 2016–2022 adalah sebesar Rp134,466 triliun. Sampai dengan 17 Februari 2023, telah dilakukan pendanaan pengadaan lahan atas 106 PSN sebesar Rp106,950 triliun untuk 167.772 bidang tanah seluas 274.151.425 m2.

Khusus pada proyek jalan tol, pemerintah mengalokasikan Rp111,65 triliun untuk 55



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12 / 06 / 2023

| Sumber: radarsukabumi.com

PSN dengan Rp90,99 triliun pada 52 PSN
untuk 115.728 Bidang Seluas 156 juta m.

<https://radarsukabumi.com/berita-utama/nasib-tol-bocimi-terancam-mangkrak-pembebasan-lahannya-tidak-masuk-daftar-anggaran-psn/>



13 / 06 / 2023

Sumber: Kompas.com

Sebagian Masyarakat Minta Syarat Beli Rumah Subsidi Diperlonggar

Penulis : Muhdany Yusuf Laksono
Editor : Muhdany Yusuf Laksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian masyarakat, khususnya kelas menengah, meminta Pemerintah untuk mempermudah persyaratan membeli rumah subsidi.

Hal itu sebagaimana dikutip dari laporan Rumah.com bertajuk Indonesia Consumer Sentiment Survey H1-2023.

Program rumah subsidi bukan hal yang asing bagi masyarakat. Lebih dari separuh responden mengaku telah mengetahui seputar program ini.

Meski demikian, 3 dari 5 responden merasa program ini belum terlalu signifikan dalam mengatasi permasalahan hunian di Indonesia.

Untuk itu, 1 dari 2 responden ingin manfaat hunian subsidi dikurangi tetapi syarat diperlonggar.

Atau bisa dibilang, separuh responden berharap Pemerintah memperlonggar syarat pembelian rumah subsidi agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya.

Harapan ini terutama datang dari responden kelas menengah yang sudah tak memenuhi syarat penghasilan untuk rumah subsidi, namun merasa penghasilannya masih terlalu kecil untuk membeli atau mencicil rumah non-subsidi.

Ada 2 dari 5 responden mengaku tak memenuhi syarat membeli rumah subsidi. Namun mereka juga tak mampu membeli hunian non-subsidi.

Sebagai informasi, salah satu skema pembiayaan untuk pembelian rumah subsidi yang berlaku ialah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dikutip dari laman resmi BP Tapera, berikut persyaratan untuk mengajukan FLPP:

Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia;

Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah;

Penerima atau pasangan belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah;

Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020;

Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun;

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.